

# Ma'ruf Amin Minta MUI Cegah Radikalisme dengan Pola Pikir Moderat

written by Harakatuna



**Harakatuna.com.** Jakarta - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memimpin rapat Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam rapat, dia meminta MUI menggunakan [pola pikir wasathy](#) atau moderat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pihaknya meminta MUI turut melakukan kontra propaganda radikalisme dengan pola pikir moderat.

“Intinya pertama tentang cara berpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tapi tengah, wasathy,” kata Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden. Hal ini ia sampaikan saat rapat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Senin (29/3).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengatakan MUI selama ini konsisten melakukan kaderisasi ulama. MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama itu harus mengawal perkembangan pemahaman Islam di Indonesia. Pihaknya menuturkan bahwa perjuangan MUI untuk menjaga keutuhan negara ini sudah lama terjalin. Terutama dalam menjaga keutuhan bangsa dari ancaman paham

radikalisme yang menyimpang ini.

## **Cegah Radikalisme, Sumbangsih MUI untuk Keutuhan Bangsa**

Selain itu, pihaknya menegaskan akan terus mengawal pola pikir moderat untuk cegah radikalisme. Menurutnya, MUI perlu mencegah paham radikalisme di tanah air agar tidak berkembang dengan menggunakan pola pikir wasathy.

“Ini kita melihat ada gejala-gejala sehingga berkembangnya radikalisme yang sering dialamatkan kepada umat. Ini kita harus menjaga betul bahwa setiap [tindakan menyimpang](#) daripada itu adalah hal-hal yang di luar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menambahkan, tak hanya mengawal pemahaman Islam, MUI juga harus mengevaluasi kinerja dan harmonisasi hubungan dengan pengurus di daerah. Langkah ini bertujuan memudahkan penerapan kebijakan yang dikeluarkan MUI pusat.

Selain itu pihaknya mengimbau agar MUI secara struktural satu komando dari pusat hingga daerah. Hal ini untuk menjaga kredibilitas dan soliditas putusan-putusan hukum yang MUI keluarkan. “Kalau sampai MUI daerah dan pusat tabrakan, tidak boleh terjadi, baik sikap-sikap politik dan ekonomi. Karena semuanya itu ada putusan-putusannya yang sudah harus dipatuhi yang harus dilaksanakan,” tandasnya.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Jimly Asshiddiqie sependapat dengan Ma’ruf Amin. Dia menilai penerapan paham wasathy sangat penting di Indonesia.